



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KAMARUDDIN AMIN**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **507966**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.160.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/100 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 1200 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/129 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/150 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
5. Tanah Seluas 352 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 330 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 290 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 514 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/50 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 635 m2/300 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.875.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.351.196.701

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----



Sub Total	Rp.	10.511.196.701
III. HUTANG	Rp.	677.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.834.196.701

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.